

ABSTRAK

Mugram Lessy (01659180034)

ANALISIS YURIDIS INSOLVENCY TEST MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Tesis ini membahas mengenai insolvensi sebagai syarat pengajuan kepailitan. Dalam hukum kepailitan debitör dapat dimohonkan pernyataan pailit apabila debitör tersebut dalam keadaan insolven “tidak mampu membayar utang”. Keadaan insolven adalah keadaan dimana aset yang dimiliki debitör tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban membayar utang. Syarat Kepailitan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mensyaratkan terdapatnya lebih dari dua kreditor dan utang yang jatuh waktu tanpa syarat insolvensi. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia yang masih solven dipailitkan.

Teisis ini disusun dengan metode penulisan hukum yuridis normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, di Amerika Serikat dan Inggris mengatur insolvensi sebagai syarat permohonan pailit, salah satu metode yang digunakan adalah *balance sheet insolvency test*. Metode ini digunakan untuk menentukan kemampuan membayar debitör saat jatuh waktu utangnya, dengan menilai dari aset-aset yang dimiliki debitör dibandingkan dengan kewajibannya saat jatuh waktu utangnya; *kedua*, dengan peran Hakim memaksimalkan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan sesuai amanat Pasal 1 Ayat (1) *Juncto* Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tetantang Kekuasaan Kehakiman dapat memanfaatkan *insolvency test* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjadikan kemampuan membayar sebagai syarat kepailitan selain dari syarat yang sudah ditentukan untuk memberikan keseimbangan dan perlindungan hukum kepada kreditor, debitör, dan *stakeholders* dalam menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional, sehingga debitör yang solven tidak mudah dipailitkan.

Kata kunci :
Kepailitan, Tes Insolvensi, Hakim.

ABSTRACT

Mugram Lessy (01659180034)

ANALISIS YURIDIS INSOLVENCY TEST MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

This thesis deals with insolvency as a condition of bankruptcy filing. In a bankruptcy law the debtor may be required to file a bankruptcy statement if the debtor is in a state of insolvency "unable to pay the debt". An insolvency situation is a situation where an asset owned by a debtor is insufficient to meet its debt repayment obligations. The Bankruptcy Requirements contained in Act Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and postponement of debt payment only require the presence of more than two creditors and debts that fall due without insolvency conditions. This has caused many companies in Indonesia to remain bankrupt.

This thesis was compiled with the method of writing normative juridical law to produce descriptive analytical data. The results of the study concluded that first, in the United States and the United Kingdom regulating insolvency as a condition for bankruptcy requests, one of the methods used was the balance sheet insolvency test. This method is used to determine the ability to pay debtor when the debt is due, by valuing the assets owned by the debtor compared to the obligations when the debt is due; secondly, with the Judge's role maximizing their function as law enforcement and justice in accordance with the mandate of Article 1 Paragraph (1) Juncto Article 5 Paragraph (1) of Act Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, can utilize the insolvency test associated with Act Number 37 of 2004 making the ability to pay as a condition of bankruptcy in addition to the conditions that have been determined to provide balance and legal protection to creditors, debtors, and stakeholders in maintaining the investment climate and national economic growth, so that the debtor the solvents are not easy to bankrupt.

Keywords :
Bankruptcy, Insolvency Test, Judge.